

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA
LPD DESA ADAT TANDEG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI WAYAN RASMINI
NIM : 2415664119**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA LPD DESA ADAT TANDEG

**NI WAYAN RASMINI
2415664119**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

LPD merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di Provinsi Bali yang terletak di desa adat. Pemberian kredit merupakan usaha pokok LPD, dalam pemberian kredit inilah manajemen (pengurus atau pengelola) wajib mengaplikasikan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Persentase kredit macet di LPD Desa Adat Tandeg masih ada, kredit macet pada dasarnya tidak terjadi secara spontan, melainkan dengan suatu proses. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pengelola LPD untuk menyehatkan kembali kondisi keuangan LPD sehingga mampu mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Tandeg. Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menghantarkan pada sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Tandeg sudah dikatakan baik dan memadai dengan menggunakan analisis 5C, *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Tandeg yaitu dengan diberitahukan secara langsung dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi, diberikan surat peringatan SP 1, SP 2, SP 3, bagi warga desa adat akan membawa kasus kredit bermasalah ke paruman desa adat dan dilakukan penarikan jaminan. Bagi warga luar desa adat maka akan langsung dilakukan penarikan jaminan. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit telah berjalan secara baik dan memadai, LPD diharapkan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan kreditnya.

Kata Kunci: Prosedur Kredit, Pemberian Kredit, Lembaga Perkreditan Desa

ANALYSIS OF THE CREDIT GRANTING SYSTEM AND PROCEDURES AT THE LPD OF THE TRADITIONAL VILLAGE OF TANDEG

NI WAYAN RASMINI

2415664119

*(Applied Bachelor's Degree Program in Managerial Accounting, Bali State
Polytechnic)*

ABSTRACT

LPD is one of the microfinance institutions in Bali Province located in a traditional village. Credit provision is the main business of LPD, and in providing credit, the management (administrators or managers) must apply the principle of prudence to minimize bad debt. The percentage of non-performing loans at LPD Desa Adat Tandeg still exists. Non-performing loans do not occur spontaneously but through a process. This situation poses a challenge for LPD managers to restore the financial health of LPD so that it can anticipate the occurrence of problematic loans. This study aims to identify the system and procedures for granting loans at LPD Desa Adat Tandeg. This study was designed as a qualitative research. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that the credit granting system and procedures at the Tandeg Traditional Village LPD were considered good and adequate using the 5C analysis, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy. The procedure for resolving problematic loans at the LPD of the Traditional Village of Tandeg involves direct notification using various communication channels, issuing warning letters SP 1, SP 2, and SP 3, and for residents of the traditional village, bringing the problematic loan case to the traditional village council and enforcing collateral. For non-traditional village residents, collateral is immediately seized. Although the research findings indicate that the credit granting procedure has been implemented effectively and adequately, the LPD is encouraged to maintain and improve the quality of its credit management.

Keywords: Credit Procedures, Credit Granting, Village Credit Institutions

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	iv
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	18
C. Alur Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	24
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	25
D. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	25
E. Keabsahan Data.....	27
F. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian.....	30
B. Pembahasan	38

C. Keterbatasan Penelitian	48
BAB V PENUTUP	50
A. Simpulan.....	50
B. Implikasi.....	51
C. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Laba, Aset dan Modal LPD Desa Adat Tandeg Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Kredit yang disalurkan pada LPD Desa Adat Tandeg Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.....	6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Pikir Penelitian.....	24
Gambar 4.1	Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada LPD Desa Adat Tandeg.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Wawancara	51
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	52
Lampiran 3. Lembar Wawancara Penelitian.....	53
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian.....	54
Lampiran 5. Form Analisa Kelayakan 5C Proses Kredit di LPD Desa Adat Tandeg	55
Lampiran 6. Formulir Permohonan Pinjaman Kredit.....	57
Lampiran 7. Formulir Persetujuan Kredit.....	59
Lampiran 8. Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Jaminan.....	60
Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bali adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi yang masih kuat hingga saat ini (BPS, 2022). Budaya Bali tetap hidup karena adanya desa adat atau desa pekraman yang masih terjaga dengan baik. Desa adat ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Bali, tidak hanya dalam hal budaya dan agama, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan layanan publik yang biasanya ditangani oleh pemerintah (Widyani et al., 2020). Dalam sistem pemerintahan di Bali, desa adat masih sangat berpengaruh. Setiap desa adat memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupannya sesuai aturan dan tradisi setempat. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dari desa adat adalah pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan mikro yang berada di lingkungan desa adat dan didirikan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa (LPLPD, 2022a). LPD pertama kali diinisiasi pada November 1984 oleh Gubernur Bali saat itu, Ida Bagus Mantra (alm.), sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi daerah Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 dan Nomor 8 Tahun 2002 (LPLPD, 2022b), tujuan utama pendirian LPD adalah mendorong kebiasaan menabung, menyediakan kredit bagi usaha kecil, menghindari praktik kredit yang merugikan, serta membuka peluang usaha yang merata di tingkat desa. Selain itu, LPD juga berperan dalam meningkatkan peredaran uang di desa. LPD memiliki tanggung jawab besar karena mengelola

dana masyarakat dari berbagai banjar di wilayah desa adat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan transparan agar bisa memberikan manfaat optimal bagi desa. Dalam prosesnya, pengawasan internal sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa LPD adalah Badan Usaha Simpan Pinjam milik desa adat (*desa pakraman*) (PEMDA, 2013). Tujuan utamanya adalah mengembangkan ekonomi desa melalui tabungan dan penyertaan modal, memberantas praktik gadaai gelap, menciptakan pemerataan usaha, meningkatkan daya beli, serta mendukung sistem pembayaran dan peredaran uang di desa.

Untuk menjalankan misinya, manajemen LPD perlu mengelola kegiatan operasional seperti penghimpunan dana melalui deposito dan tabungan, serta penyaluran dana melalui pinjaman atau kredit kepada anggota. Meskipun LPD tidak tunduk pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (MENHAKA, 2013), dalam praktiknya LPD tetap menerapkan prinsip-prinsip perbankan seperti prinsip kehati-hatian dan pengawasan kegiatan operasional (Indriyani & Putra, 2022). Kegiatan pemberian kredit merupakan inti usaha LPD, sehingga manajemen wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kredit macet (Puspayani et al., 2020). Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting agar operasional LPD berjalan lancar dan mampu mengatasi berbagai permasalahan. Dalam operasionalnya, sistem memiliki peran penting karena setiap bagian saling berhubungan (Sawitri et al., 2024). Sistem dirancang untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sering muncul. Dalam konteks ini, sistem akuntansi merupakan bagian dari organisasi yang mencakup formulir, catatan, dan

laporan yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan. Perlu dibedakan antara sistem dan prosedur. Sistem adalah jaringan prosedur yang disusun secara terpadu untuk menjalankan aktivitas utama organisasi. Sedangkan prosedur adalah urutan kegiatan administratif yang melibatkan lebih dari satu bagian atau departemen. Untuk mendukung pengelolaan LPD, sistem akuntansi yang digunakan haruslah tersusun secara terpadu, dan prosedurnya harus dirancang agar transaksi yang terjadi dapat ditangani secara konsisten.

Setiap transaksi kredit, setidaknya terdapat dua pihak utama yang terlibat, yakni kreditur dan debitur. Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan debitur adalah pihak yang menerima pinjaman dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut, baik saat diminta maupun dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kredit sendiri mengandung hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran, sebagai akibat dari penyerahan uang atau barang pada masa kini. Dalam praktiknya, sistem pemberian kredit sangat erat kaitannya dengan proses analisis kredit. LPD sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat perlu mengetahui dan mengevaluasi itikad baik dari calon debitur, yang meliputi kemampuan membayar, kemandirian finansial, kelangsungan usaha, serta nilai agunan atau jaminan yang dimiliki. Oleh karena itu, LPD biasanya melakukan survei terlebih dahulu terhadap calon debitur sebelum menyetujui pengajuan kredit (Trisnawati, 2021).

Prosedur pemberian kredit pada LPD secara umum tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang bergerak di sektor perkreditan rakyat. Perbedaan yang mungkin ada terletak pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan masing-

masing LPD, serta pada tujuan dari pemberian kredit itu sendiri, yang sering kali disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa adat setempat.

Adapun data perkembangan laba, aset dan modal LPD Desa Adat Tandeg periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Perkembangan Laba, Aset dan Modal LPD Desa Adat Tandeg
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

Tahun	Laba(Rp)	Aset (Rp)	Modal (Rp)
2020	2.050.754.000	61.500.470.000	8.880.475.000
2021	1.558.204.000	62.300.043.000	10.110.928.000
2022	1.821.708.000	76.985.667.000	11.045.850.000
2023	2.222.999.000	94.936.216.000	12.138.875.000
2024	2.482.739.000	110.834.923.000	13.472.674.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Adat Tandeg (2024)

Berdasarkan data tentang pengembangan laba, aset dan modal LPD Desa Adat Tandeg, periode dari tahun 2020 hingga 2024 pada Tabel 1.1 cenderung meningkat setiap tahun, tetapi analisis laporan keuangan atau menganalisis rasio keuangan harus dilaksanakan. Dalam hal ini, pihak berwenang menggunakan rasio lembaga keuangan untuk lebih fokus pada keuntungan (terhadap laba), dengan tujuan mendukung efisiensi LPD yang lebih bermanfaat dan sangat berguna untuk mengeksplorasi pencapaian yang digunakan perusahaan, yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan meningkatkan efisiensi keuangan LPD. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan finansial saja tidak cukup untuk mengukur kemampuan sebuah badan usaha, sehingga kita juga perlu mengevaluasi dari segi manajemen yang diterapkan.

Salah satu persoalan terbesar yang terjadi pada institusi keuangan adalah kredit bermasalah (*non-performing loan*). Permasalahan ini merupakan salah satu risiko yang ditimbulkan dari aktivitas penyaluran kredit yang dilakukan LPD kepada masyarakat (Zamri et al., 2020). Meskipun kredit bermasalah bukanlah suatu hal baru dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro maupun dunia perbankan, namun terjadinya kredit bermasalah sangat mempengaruhi pendapatan operasional LPD (Ariani et al., 2020). Kasus kredit bermasalah terjadi pada beberapa LPD, termasuk juga di LPD Desa Adat Tandeg.

Dari laporan tentang kegiatan dan perkembangan pinjaman kredit, terlihat bahwa jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah setiap tahun terus meningkat di LPD Desa Adat Tandeg. Hal ini menunjukkan bahwa LPD berhasil mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat yang berusaha dapat mendapatkan bantuan dari LPD tersebut. Ini berarti sistem dan prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Tandeg sudah berjalan dengan baik. Laba atau keuntungan yang diperoleh oleh LPD juga berasal dari aktivitas pemberian kredit.

Berdasarkan Tabel 1.2 maka dapat dilihat persentase penilaian terhadap kredit yang diberikan, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit lancar mengalami peningkatan, sedangkan kredit diragukan dan macet mengalami penurunan. Jumlah kredit yang disalurkan oleh LPD Desa Adat Tandeg dilihat bahwa persentase kredit macet masih ada.

Tabel 1. 2
Jumlah Kredit yang disalurkan pada LPD Desa Adat Tandeg
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

Tahun	Jumlah Debitur (orang)	Jumlah Kredit yang Disalurkan (Rp)	Penilaian Atas Pinjaman yang Diberikan (%)			
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2020	326	40.067.365	87,56	7,74	1,62	3,08
2021	276	36.312.030	69,90	20,69	3,86	5,55
2022	246	34.058.532	72,66	17,81	2,15	7,38
2023	252	50.208.973	92,40	5,62	0,50	1,48
2024	256	60.241.548	93,95	3,05	0,49	2,51

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Adat Tandeg (2024)

Persentase kredit macet pada tahun 2021 sebesar 5,55% dan tahun 2022 sebesar 7,38%. Penyaluran kredit pada tahun 2021 sebesar 36.312.030 dengan jumlah debitur 276 orang dan tahun 2022 penyaluran kredit sebesar Rp. 34.058.532, jumlah debitur 246 orang. Dari tahun 2021-2022 persentase kredit macet masih terlalu tinggi. Hal ini disebabkan oleh akibat pandemi *covid-19* yang terjadi pada akhir tahun 2019 sehingga banyak sektor bisnis melemah.

Pada tahun-tahun setelah pandemi *covid-19*, LPD Desa Adat Tandeg masih menghadapi permasalahan kredit macet, yang mencerminkan belum pulihnya kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Meskipun demikian, jumlah penyaluran kredit terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, total kredit yang disalurkan mencapai Rp 50.208.973 dengan persentase kredit macet sebesar 1,48%. Sementara itu, pada tahun 2024, nilai kredit yang disalurkan meningkat menjadi Rp 60.241.548, namun persentase kredit macet juga naik menjadi 2,51%. Hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan kredit bermasalah seiring bertambahnya jumlah penyaluran kredit. Kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pihak kreditur (LPD) maupun dari debitur. Dari sisi kreditur,

beberapa faktor penyebab antara lain adalah kesalahan dalam menganalisis kelayakan nasabah, kemudahan dalam pemberian kredit tanpa pertimbangan yang matang, kesalahan administrasi (*human error*), serta faktor eksternal seperti bencana alam (*force majeure*). Sementara itu, dari sisi debitur, kredit macet umumnya disebabkan oleh kegagalan usaha yang dijalankan, musibah pribadi, atau kondisi ekonomi yang memburuk sehingga menurunkan pendapatan dan kemampuan membayar cicilan kredit. Permasalahan ini cukup sering terjadi mengingat sebagian besar nasabah LPD merupakan krama desa pakraman yang belum seluruhnya memiliki pola pembayaran yang lancar.

Kondisi kredit macet ini menjadi tantangan bagi pengelola LPD untuk menegatkan kembali kondisi keuangan LPD sehingga mampu mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat dalam pemberian kredit masih ditemukan kredit macet di LPD Desa Adat Tandeg yang disebabkan oleh beberapa hal baik dari kreditur maupun debitur. Untuk mengetahui lebih mendalam kondisi kredit macet yang ada, penulis akan melakukan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Tandeg?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada analisis sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Tandeg dengan mempergunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) pada tahun 2024.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Tandeg.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu penulis dapat memahami bagaimana analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic* dapat digunakan untuk mengetahui baik buruknya sistem dan prosedur pemberian kredit untuk lembaga keuangan, dalam hal ini pada LPD Desa Adat Tandeg.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi LPD

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi LPD Desa Adat Tandeg untuk memperbaiki sistem dan prosedur dan pemberian kredit.

2) Bagi LPLPD

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi LPLPD Kabupaten Badung untuk menilai sistem dan prosedur pemberian kredit di LPD.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Politeknik Negeri Bali khususnya dalam pengetahuan sistem dan prosedur pemberian kredit di lembaga keuangan.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggali dan menuangkan pemikiran kritis terkait fenomena analisis sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD.

JURISAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Tandeg, diperoleh berbagai temuan yang menggambarkan mekanisme kerja lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kredit pada LPD Desa Adat Tandeg ditunjukkan melalui penggunaan formulir, buku catatan, serta prosedur pendukung yang sesuai standar operasional. Penelitian ini sejalan dengan [Yasa & Yuniarta \(2022\)](#) yang menyatakan proses pemberian kredit dimulai dari pengajuan permohonan oleh debitur, dilanjutkan dengan penjelasan persyaratan oleh bagian kredit. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, dilakukan analisis kelayakan berdasarkan metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*). Selanjutnya, bagian kredit menyusun memo analisis kredit untuk disetujui oleh kepala LPD. Apabila disetujui, permohonan kredit dinyatakan diterima oleh pihak LPD. Namun demikian, proses penilaian karakter masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Dalam prakteknya, LPD banyak mengandalkan pendekatan informal dan hubungan sosial dalam menilai karakter nasabah, mengingat belum adanya instrumen baku atau sistem yang objektif. Hal

ini menimbulkan potensi subjektivitas dalam pengambilan keputusan kredit. Serta kurangnya data historis atau riwayat kredit nasabah secara sistematis, dan sulitnya membedakan antara perilaku nasabah yang benar-benar jujur dan yang hanya pura pura di awal pengajuan kredit . Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun karakter merupakan aspek penting dalam mitigasi risiko kredit, penilaiannya tetap menjadi bagian paling rentan terhadap bias dan ketidaktepatan, terutama dalam konteks LPD yang sangat kental dengan nilai lokal.

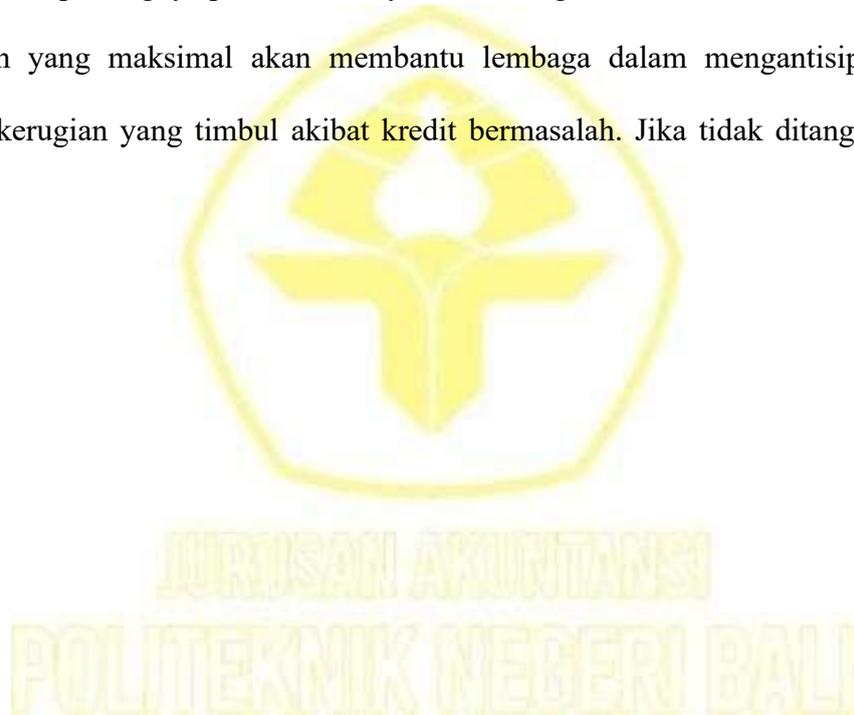
2. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah pada LPD Desa Adat Tandeg juga telah dilaksanakan secara terstruktur. Penanganan dilakukan melalui pemberitahuan langsung menggunakan berbagai sarana komunikasi, kemudian pemberian Surat Peringatan (SP) secara bertahap, mulai dari SP 1 hingga SP 3. Bagi debitur yang merupakan warga Desa Adat, penyelesaian akan dilanjutkan melalui Paruman Desa Adat untuk mediasi dan, jika diperlukan, penarikan jaminan. Sementara itu, bagi debitur dari luar desa adat, penarikan jaminan akan dilakukan secara langsung oleh pihak LPD (Lisa, 2022).

B. Implikasi

Penelitian ini digagas dan dipersembahkan untuk mengungkapkan fenomena sistem dan prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Tandeg. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pemberian kredit bermasalah di LPD Desa Adat Tandeg, ditemukan bahwa proses pemberian kredit telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sebelum kredit disetujui, dilakukan analisis terlebih dahulu oleh petugas analisis kredit. Tahapan ini memiliki peran penting dalam mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah, sehingga penilaian terhadap calon debitur harus dilakukan secara cermat dan tepat.

Dalam menangani kredit bermasalah, LPD menerapkan langkah-langkah bertahap, mulai dari pemberitahuan langsung, pengiriman surat peringatan (SP) 1 hingga SP 3, dan diakhiri dengan penarikan jaminan. Temuan ini sejalan dengan teori kredit yang menekankan pentingnya analisis sebelum realisasi pinjaman sebagai upaya pencegahan terhadap kredit bermasalah.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPD perlu terus menekankan pentingnya penilaian kelayakan kredit guna meminimalisir risiko. Penilaian yang maksimal akan membantu lembaga dalam mengantisipasi potensi kerugian yang timbul akibat kredit bermasalah. Jika tidak ditangani



secara tepat, kredit bermasalah dapat mengancam keberlangsungan operasional LPD, sehingga dibutuhkan upaya penanganan yang serius dan berkelanjutan.

C. Saran

Sampailah bagian penutup dari penelitian ini, beberapa saran disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemberian kredit. Saran-saran tersebut disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. LPD Desa Adat Tandeg

Meskipun sistem dan prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Tandeg telah berjalan dengan baik, juga diperlukan pengembangan instrumen atau pedoman penilaian karakter yang lebih sistematis dan objektif, meskipun bersifat kualitatif. Pelatihan bagi petugas kredit dalam membaca bahasa tubuh, konsisten jawaban, serta pemanfaatan data sosial dapat membantu meningkatkan akurasi penilaian. Upaya menjaga konsistensi dalam pengelolaan kredit menjadi penting agar kualitas pengelolaan LPD tetap terjaga, sekaligus membuka peluang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Meskipun sistem dan prosedur pemberian kredit di LPD Desa Adat Tandeg telah berjalan dengan baik serta dinilai memadai, upaya untuk mempertahankan kualitas tersebut tetap diperlukan.

2. Masyarakat

Kedepannya diharapkan LPD Desa Adat Tandeg dapat menyesuaikan dan menyederhanakan persyaratan permohonan kredit, khususnya terkait ketentuan

jaminan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses fasilitas pinjaman yang disediakan.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan indikator baru yang relevan dengan operasional LPD, tidak hanya terbatas pada prosedur pemberian kredit. Misalnya, dapat diteliti aspek peningkatan penyaluran kredit



atau prosedur terkait deposito berjangka di LPD. Selain itu, dalam melakukan kajian mengenai prosedur pemberian kredit, diharapkan wawancara atau survei tidak hanya difokuskan pada pihak internal LPD, tetapi juga melibatkan nasabah sebagai responden, guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ariani, I. G. A. P., Endiana, I. D. M., Arizona, I. P. E., & Kusuma, I. G. E. A. (2020). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma*, 2(3), 89–93.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Baridwan, Z. (2012). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur Dan Metode*.
- BPS Bali. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan III Tahun 2022* [Broadcast]. In Berita Resmi Statistik (Issue No. 66/11/51/Th. XVI, 7 November 2022).
- Creswell, W. (2022). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Darmayasa, N. (2024). Understanding Digital Transformation Village Credit Institutions Towards Sustainability Based on Local Genius. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 18–24. <https://doi.org/10.38043/jiab>
- Dewi, C. I. R. S., Triyuwono, I., & Hariadi, B. (2024). Corporate Social Responsibility Model Based on Tri Hita Karana Philosophy. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2295056>
- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriyani, N. M. V., & Putra, I. W. G. Y. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 21(2), 168–174. <https://doi.org/10.22225/we.21.2.2022.168-174>
- Kasmir. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Prenada Media.
- Komaria, S., Oktariansyah, & Emilda, V. (2023). Analisis Sistem Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya. *Emilda*, 3(4), 179–180.
- Lisa, K., Putu Arie Indraswarawati, S. A., & Lesmana Putra, I. M. E. (2022). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Dalam Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Manggissari. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 249–259. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2921>
- LPLPD. (2022a). *Blue Print Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tahun 2018-2022*. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat.

- LPLPD. (2022b). *Pedoman Administrasi Pembukuan Dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat.
- Lubis, M. S. I., & Purba, B. (2021). Jaringan Kerja Komunikasi Dalam Organisasi. *Publik Reform*, 8(2), 45–56. <https://doi.org/10.46576/jpr.v8i2.1661>
- MENHAKA. (2013). *UU No. 1 Tahun 2013 . Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 4th Edition*. *Internasional Journal*.
- Mulyadi. (2017). *Auditing. Buku Satu Edisi Keenam (6th Ed., Vol. 6)*. Salemba Empat.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- Ningtias, N. L. D. A., & Pratiwi, N. P. T. W. (2020). Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Cengkilung Denpasar Utara. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 825850.
- PEMDA. (2013). *Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017. . Sekretaris Daerah Provinsi Bali*.
- Puspayani, N. L. P., Dharma, E. M., & Werthi, K. T. (2020). Model Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Menggunakan Metode Profile Matching pada LPD Dukuh Buah. *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer*, 16(2), 31. <https://doi.org/10.35889/progresif.v16i2.507>
- Rahayu, N. I., & Putra, S. (2021). Prosedur Pemberian Kredit Dan Penanganan Kredit Macet Di Era Pandemi Pada PT. BPR Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting And Business Journal*, 1(1), 261–269.
- Rivai, H. V., Basir, S., Sudarto, S., & Dan, V. (2013). *Commercial Bank Management*. PT Rajagrafindo Persada.
- Sawitri, A. P., Sukandani, Y., Adi, B., Rachman, M. M., Aripriowo, T., & Hartini, C. M. S. (2024). Mengintegrasikan Teknologi AI Dalam Pencatatan Keuangan UMKM Di Desa Gedangan Kecamatan Gedangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2).
- Setiyadi, B., Segara, R. M., & Sinambela, R. H. (2020). Prosedur Dan Tata Kerja Pendidikan Non Formal. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 12–19. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JLC>
- Suardika, I. K. (2021). Analisis Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas Pada Lpd Desa Banyuning. *Jurnal Artha Satya Dharma*, 14(2), 37–42.
- Sukendri, N., Muktiyanto, A., Geraldina, I., & Safitri, J. (2023). Harmony of Bank Structure Ownership through Tri Hita Karana Cultural Concept. *Journal of*

Accounting and Strategic Finance, 6(2), 259–279.
<https://doi.org/10.33005/jasf.v6i2.469>

- Trisnawati, N. L. D. E. (2021). Pengelolaan Risiko berbasis Nilai Catur Purusa Artha terhadap Kinerja Keuangan BUMDes. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 12–21. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i2.390>
- Unaradjan, D. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Widyani, A. A. D., Landra, N., Sudja, N., Ximenes, M., & Sarmawa, I. W. G. (2020). The role of ethical behavior and entrepreneurial leadership to improve organizational performance. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1747827. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1747827>
- Yasa, N. M. U., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada LPD Desa Pakraman Keramas. . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*.
- Zamri, F. Y., Handajani, L., & Rifai, A. (2020). Analysis Factors Affecting Non Performing Loan At Rural Bank In West Nusa Tenggara. . *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 815–827.
- Zamzami, F., Nabella, D. N., & Arifin, I. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. Gadjah Mada University Press.

JURISAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI